
STRATEGI PENINGKATAN PAJAK POTENSIAL DI PROVINSI JAMBI

Muhammad Safri¹
Dosen Universitas Jambi¹
m_syafri@unja.ac.id

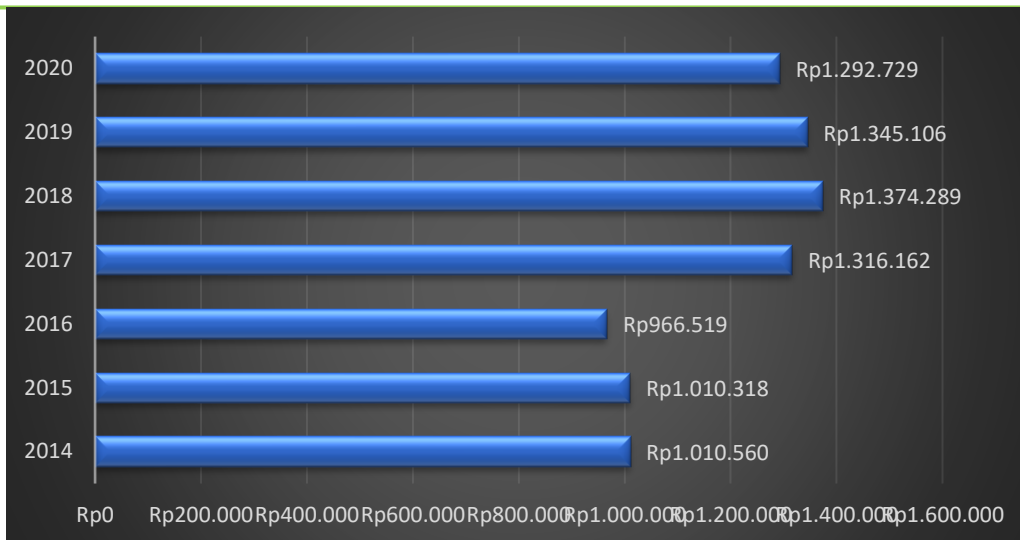
Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis perkembangan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi Tahun 2009-2020, mengetahui dan menganalisis jenis pajak daerah manakah yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020 dan menganalisis strategi peningkatan pajak potensial Provinsi Jambi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan alat analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi, pertumbuhan dan elastisitas terlihat bahwa pajak daerah yang potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan dari hasil penelitian Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial dikembangkan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil analisis SWOT maka dapat disimpulkan strategi yang tepat untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak potensial adalah pada strategi SO. Adapun strategi SO tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM atau aparatur, meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sarana komputer dan koordinasi dengan tim intensifikasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci : *Pajak Daerah Potensial, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Analisis SWOT.*

PENDAHULUAN

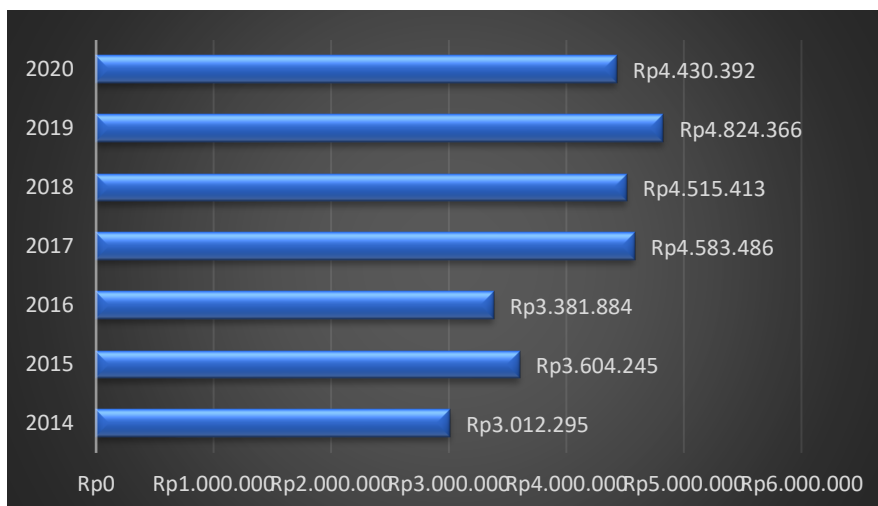
Dalam usaha meningkatkan penerimaan daerah, pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang terbesar dan juga yang terpenting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjut dari usaha peningkatan kemampuan pemerintah dalam mengerahkan dan memanfaatkan hasil-hasil sumber keuangan yang berasal dari potensi daerahnya sendiri, khususnya pajak daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak di Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1

Perkembangan penerimaan pajak di Provinsi Jambi Tahun 2014-2020 (Rp. Juta)

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak di Provinsi Jambi setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus keuangan daerah dan menggali potensi keuangan daerah masing-masing dengan memberikan kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah yang kemudian penerimaan daerah tersebut dipergunakan untuk membiayai pemerintahan daerah tersebut.



Gambar 2

Perkembangan belanja daerah di Provinsi Jambi Tahun 2014-2020 (Rp. Juta)

Perkembangan belanja daerah di Provinsi Jambi selama tujuh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jika dilihat pada kedua gambar tersebut bahwa realisasi pajak nilainya sangat jauh lebih kecil dari belanja daerah. Seharusnya pajak dapat ditingkatkan agar pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kemandiriannya dan mengurangi ketergantungan dari pusat. Salah satu caranya adalah dengan menggali potensi pajak dan meningkatkan pajak potensial.

Hidayah (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah rata-rata mencapai 14,39% dan 20,02% pertahun. Kemudian kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD rata-rata mencapai 2,23% dan 56,21% pertahun; sedangkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBD rata-rata mencapai 1,31% dan 4,20% per tahun. (3) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2006 sampai 2010 dapat dikatakan efektif karena memiliki tingkat efektivitas lebih dari 100%.

Juri (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda terus meningkat dalam periode Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun 2010. Melihat kontribusi komponen pajak daerah terhadap PAD kota Samarinda sangat fluktuatif, hal ini banyak diakibatkan karena terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai tahun 2010.

Dirasmi (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas retribusi Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2012 adalah sebesar 24,69% dan kriterianya tidak efektif karena banyak dari target sumber retribusi yang tidak terealisasi. Pada 2013 sebesar 94,56% efektif dengan kriteria cukup sedangkan pada 2014 sebesar 111,18% dengan kriteria sangat efektif untuk Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Keuangan dan Manajemen Aset Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan evaluasi dengan menyiapkan retribusi target pendapatan yang berpotensi diwujudkan. Tingkat efisiensi retribusi Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2014 sudah termasuk dalam kriteria sangat efisien, karena rasio efisiensi di bawah 10%.

Anggraini (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara statistik membuktikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil laba BUMD berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap PAD Kota Surabaya. Pajak daerah menjadi penerimaan yang paling dominan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Trisnaningrum (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variable penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur berpengaruh secara simultan terhadap PAD. Dari uji F (Fisher) dengan analisis tabel Anova dijelaskan bahwa menunjukkan nilai hasil uji F sebesar 607,214 dengan tingkat signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama mempengaruhi variabel PAD.

Supriyanto (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2008-2015 dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2008-2015.

Hasmin (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 1). Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, 2). Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, 3). Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.

Usulu (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jaya Pura”. Berdasarkan hasil penelitian kontribusi dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura yang disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD, menunjukkan bahwa Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2011 hingga 2015 dari pajak daerah untuk PAD berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dengan rata-rata sebesar 20,01%

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas dan menganalisa perkembangan penerimaan pajak daerah tersebut, melihat pajak potensialnya dan menganalisis pengaruhnya dengan belanja daerah serta menganalisis strategi peningkatannya pajak potensial tersebut. Analisa diatas akan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul “*Strategi Peningkatan Pajak Potensial di Provinsi Jambi*”

METODE PENELITIAN

Metode analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif, yaitu analisis yang menguraikan suatu keadaan atau persoalan yang didukung oleh fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dianalisis. Alat analisisnya yaitu: menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif.

Perkembangan penerimaan pajak daerah

Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009-2020, maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus pertumbuhan tahunan sebagai berikut :

$$PD_i = \frac{PD_{it} - PD_{it-1}}{PD_{it-1}} \times 100\%$$

Dimana :

PD_i = Perkembangan Pajak Daerah Tahun t

PD_{it} = Nilai penerimaan pajak Daerah tahun t

PD_{it-1} = Nilai penerimaan pajak Daerah tahun sebelumnya

Jenis pajak daerah potensial untuk dikembangkan

Untuk mengetahui dan menganalisis jenis pajak daerah manakan yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020, digunakan rumus sebagai berikut :

Model Kontribusi

$$KPD = \frac{PD}{TPD} \times 100\% \quad (\text{Sudjana, 2002})$$

Dimana :

KPD = Kontribusi pajak daerah terhadap total pajak daerah di Provinsi Jambi (%)

PD = Pajak Daerah

TPD = Total pajak daerah di Provinsi Jambi

Model Pertumbuhan

$$PDi = \frac{PD_{it} - PD_{it-1}}{PD_{it-1}} \times 100\% \text{ (Sudjana, 2002)}$$

Dimana :

PD_i = Perkembangan Pajak Daerah Tahun t

PD_{it} = Nilai penerimaan pajak Daerah tahun t

PD_{it-1} = Nilai penerimaan pajak Daerah tahun sebelumnya

Model Elastisitas

$$ESPPDi = \frac{\% \Delta SPPDi}{\% \Delta PDRB} \text{ (Suparmoko, 2002)}$$

Dimana :

$ESPPDi$ = Elastisitas Sumber Penerimaan Pajak Daerah

$\% \Delta SPPDi$ = Perubahan Sumber Penerimaan Pajak Daerah tahun i

$\% \Delta PDRB$ = Perubahan PDRB

Menentukan pajak potensial di Provisnsi Jambi dengan kesimpulan dari 3 perhitungan diatas yaitu kriterinya sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria pajak potensial

Pajak Daerah	Rata-Rata			Kesimpulan
	Kontribusi	Pertumbuhan	Elastisitas	
Pajak	Tinggi	Tinggi	Elastis	Potensial
Pajak	Tinggi	Rendah	Elastis	Tidak potensial
Pajak	Rendah	Tinggi	Elastis	Tidak potensial
Pajak	Rendah	Rendah	Inelastis	Tidak potensial

Sumber : Suparmoko (2002)

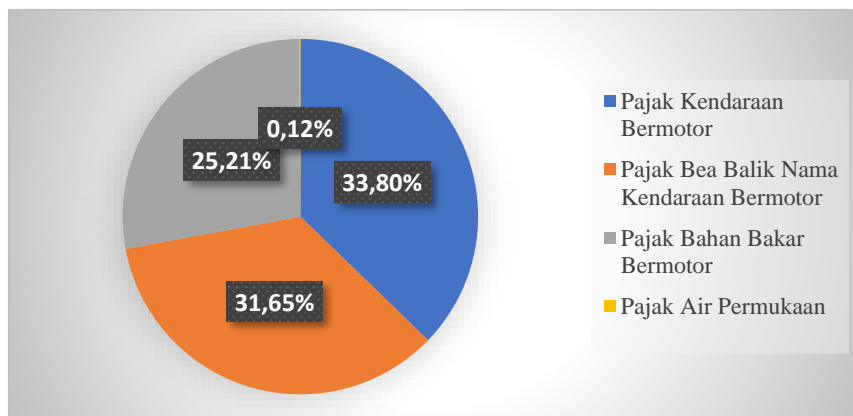
Strategi Analisis SWOT

Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu untuk mengetahui strategi peningkatan pajak potensial di Provinsi Jambi, yaitu digunakan rumus analisis SWOT. Adapun responden yang dapat menjawab SWOT adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Rangkuti (2013), mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Analisis yang digunakan dalam pemberian skor yaitu dengan pemberian peringkat dan penyusunan tabel-tabel Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) dan Matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI).

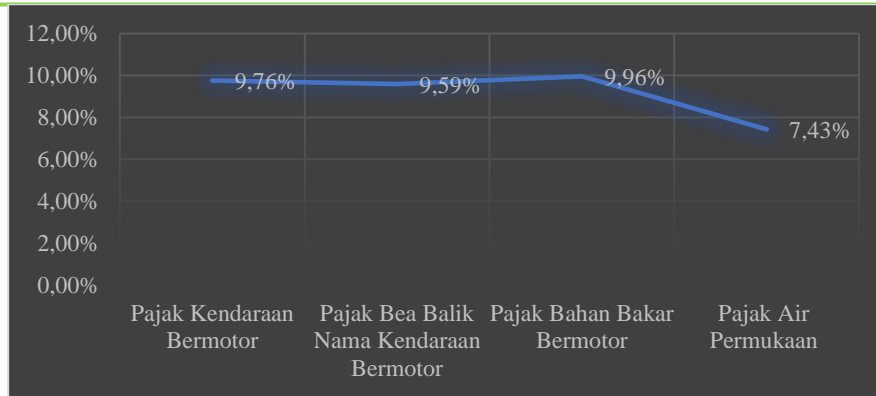
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan dari ketiga model yaitu model kontribusi, model pertumbuhan dan elastisitas maka ditarik kesimpulan pajak daerah yang potensial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Gambar 3

Kontribusi Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak di Provinsi Jambi



Gambar 4

Rata-Rata Pertumbuhan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak di Provinsi Jambi

Tabel 1. Elastisitas Potensi pajak daerah Provinsi Jambi

Pajak Daerah	Elastisitas	Kategori	Kesimpulan
Pajak Kendaraan Bermotor	1,28	Elastis	Potensial
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8,10	Elastis	potensial
Pajak Bahan Bakar Bermotor	0,53	Inelastis	Tidak potensial
Pajak Air Permukaan	2,60	Elastis	Tidak potensial

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan dari gambar dan tabel diatas terlihat bahwa hasil perhitungan kontribusi, rata-rata pertumbuhan dan elastisitas menunjukkan jenis pajak yang potensial adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, karena dari ketiga model perhitungan yang dilakukan model kontribusi lebih besar dari pajak lainnya dan model pertumbuhan juga paling tertinggi dari pajak lainnya serta model elastisitas pajak kendaraan bermotor dan dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor termasuk dalam kategori elastis. Kemudian pajak bahan bakar bermotor tidak potensial karena kategori elastisitasnya adalah inelastis karena nilainya $0,53 < 1$. Sedangkan pajak air permukaan tidak potensial karena kontribus pajaknya sangat rendah yaitu 0,12 persen.

ANALISIS SWOT

Analisis Swot merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal

(dalam) yaitu *Strengths* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan) dan faktor eksternal (luar) yaitu, *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

Hasil evaluasi faktor internal (EFI)

Hasil evaluasi faktor internal ini didasarkan atas peringkat (rating) dan bobot yang diberikan oleh responden terhadap faktor – faktor internal yang telah ditentukan. Adapun hasil evaluasi faktor internal yang diberikan yaitu:

Tabel 2 Hasil evaluasi faktor internal (EFI)

No	Faktor Internal Kekuatan (Strength)	Bobot	Rating	Bobot
				x Rating
1	Pajak Sarana dan Prasarana pendukung yang lengkap	0,20	4	0,80
2	Adanya peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang mendukung pemungutan pajak	0,25	4	1,00
3	Tersedianya sumberdaya manusia yang menjadi tim ahli pemungut pajak	0,20	4	0,80
4	Struktur organisasi telah tersusun berdasarkan Peraturan Daerah	0,05	3	0,15
Total Skor Kekuatan (Strength)		0,70		2,75
Kelemahan (Weakness)				
1	Kekurangan SDM yang berkompeten	0,10	3	0,30
2	Sistem pengumpulan data kendaraan yang tidak efisien	0,05	2	0,10
3	Kurang baiknya koordinasi antar instansi pemerintah	0,05	2	0,10
4	Kekurangan sarana pendukung	0,10	2	0,20
Total Skor Kelemahan (Weakness)		0,30		0,60
Total Kekuatan – Total Kelemahan		1,000		3,35

Sumber : Data Diolah, 2023

Keterangan : Total skor kekuatan (strength) : 2,75

Total skor kelemahan (weakness) : 0,60

Hasil Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

Hasil evaluasi faktor eksternal ini didasarkan atas peringkat (rating) dan bobot yang diberikan oleh responden terhadap faktor – faktor eksternal yang telah ditentukan. Adapun hasil evaluasi faktor eksternal yang diberikan yaitu :

Tabel 3 Hasil evaluasi faktor eksternal (EFE)

No	Faktor Eksternal Peluang (Opportunity)	Bobot	Rating	Bobot
				x Rating
1	Keamanan wilayah yang aman dan terkendali	0,20	4	0,80
2	Didukung oleh IT dan teknologi	0,05	3	0,15
3	Berkembangnya kerjasama antar OPD	0,10	4	0,40
4	Himbauan dari Anggota DPR, DPRD dan Eksekutif agar penduduk taat pajak	0,35	4	1,40
Total Skor Peluang (Opportunity)		0,70		2,75
				Bobot
	Ancaman (Threats)	Bobot	Rating	x
				Rating
1	Menurunnya perekonomian masyarakat	0,10	1	0,10
2	Belum kondusifnya beberap wilayah di Provinsi Jambi	0,05	1	0,05
3	Kurangnya kesadaran wajib pajak	0,05	2	0,10
4	Kurangnya pengetahuan wajib pajak	0,10	2	0,20
Total Skor Ancaman (Threats)		0,30		0,45
Total Peluang – Total Ancaman		1,000		3,20

Sumber : Data Diolah, 2021

Keterangan : Total skor peluang (opportunity) : 2,75

Total skor ancaman (Threats) : 0,45

Matriks SWOT

Dengan tersusunnya hasil evaluasi faktor internal (EFI) dan hasil evaluasi faktor eksternal (EFE), maka dibuatlah rumusan matriks SWOT untuk menentukan strategi yang tepat dalam peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial di Provinsi Jambi. Adapun rumusan matriks SWOT berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan eksternal, yaitu :

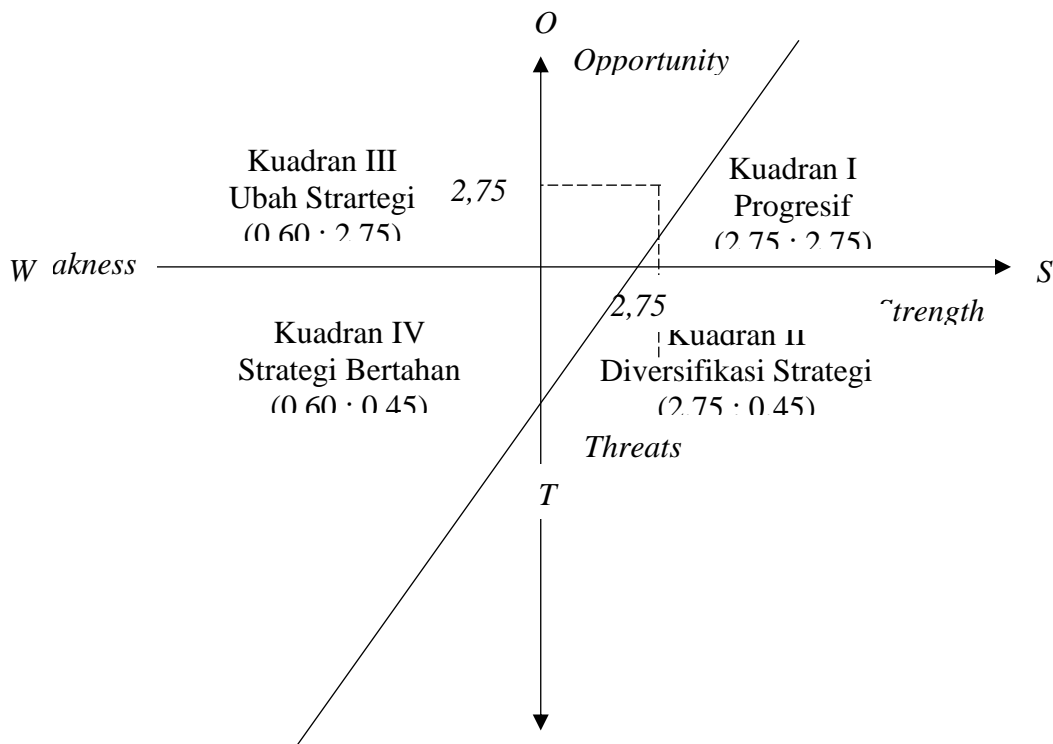
Tabel 4 Rumusan matriks SWOT

EFI	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
EFE		
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
	$SO = 2,75 + 2,75$ $SO = 5,50$	$WO = 0,60 + 2,75$ $WO = 3,35$
Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
	$ST = 2,75 + 0,45$ $ST = 3,20$	$WT = 0,60 + 0,45$ $WT = 1,05$

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari perhitungan matriks SWOT, maka diperoleh nilai tertinggi adalah SO sebesar 5,50. Dengan demikian nilai yang tertinggi merupakan strategi yang cocok dalam peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial di Provinsi Jambi. Dimana strategi SO yaitu dengan mengoptimalkan kekuatan dan memaksimalkan peluang.

Adapun dalam model analisis SWOT secara kuadran, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5 Model kuadran analisis matriks SWOT

Berdasarkan Gambar Model Analisis Matriks SWOT di atas, maka rekomendasi strategi yang paling sesuai dengan peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial di Provinsi Jambi pada posisi kuadran 1, yaitu rekomendasi strategi progresif, yang artinya Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi merupakan suatu badan atau organisasi pemerintah yang memiliki kekuatan yang besar dan peluang yang tinggi dalam meningkatkan pajak potensial sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga meraih kemajuan secara maksimal.

Matriks SWOT adalah matriks yang menginteraksikan faktor strategis internal dan eksternal. Tujuan dibuatnya matriks SWOT adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tindakan-tindakan atau strategi yang memungkinkan untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hasil analisis matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5 Matrik analisis SWOT

	EXTERNAL	
	<i>Opportunities (O)</i>	<i>Threats (T)</i>
<i>Identification of factors</i>	<ol style="list-style-type: none"> Keamanan wilayah yang aman dan terkendali Didukung oleh IT dan teknologi Berkembangnya kerjasama antar OPD Himbauan dari Anggota DPR, DPRD dan Eksekutif agar penduduk taat pajak 	<ol style="list-style-type: none"> Krisis ekonomi berkepanjangan. Situasi wilayah yang belum kondusif. Kesadaran atau pengetahuan wajib pajak. Koordinasi antar instansi terkait kurang mantap
I N T E R N A L	<i>Strength (S)</i>	<i>S vs O</i>
	<ol style="list-style-type: none"> Pajak Sarana dan Prasarana pendukung yang lengkap Adanya peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang mendukung pemungutan pajak 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas SDM aparatur Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan sarana komputer Koordinasi dengan tim intensifikasi pungutan pajak daerah provinsi terkait.
		<i>S vs T</i>
		<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan sosialisasi kebijaksanaan pajak kepada masyarakat Koordinasi rapat terbatas dengan instansi terkait Meningkatkan profesionalisme aparat di bidang teknis pelayanan

3. Tersedianya sumberdaya manusia yang menjadi tim ahli pemungut pajak
4. Struktur organisasi telah tersusun berdasarkan Peraturan Daerah

<i>Weakness (W)</i>	<i>W vs O</i>	<i>W vs T</i>
1. Kekurangan SDM yang berkompeten	1. Pengadaan diklat secara struktural/fungsional.	1. Penyempurnaan sistem pungutan pajak
2. Sistem pengumpulan data kendaraan yang tidak efisien	2. Membangun kesamaan persepsi dan komitmen antar instansi terkait.	2. Peningkatan kinerja operasional
3. Kurang baiknya koordinasi antar instansi pemerintah	3. Pemutakhiran data tiap triwulan	3. Meningkatkan ketepatan/ kecepatan pelayanan
4. Kekurangan sarana pendukung	4. Penyempurnaan sarana pendukung	4. Sosialisasi informasi secara akurat kepada masyarakat

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan analisis swot yang disajikan dalam tabel 5 diatas maka disusun strategi peningkatan pajak potensial adalah sebagai berikut :

Strategi *Strengths Opportunities* (SO)

Strategi ini berupaya untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai peluang-peluang yang ada di luar atau lingkungan eksternal. Strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM atau aparatur, meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sarana komputer dan koordinasi dengan tim intensifikasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Strategi *Strengths Threats* (ST)

Strategi ini memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kebijaksanaan pajak kepada masyarakat atau wajib pajak, melakukan rapat terbatas dengan instansi terkait dan meningkatkan profesionalisme aparat dibidang teknis pelayanan.

Strategi *Weakness Opportunities* (WO)

Strategi ini dirancang dengan meminimalkan kelemahan dan berusaha memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat di terapkan dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan mengadakan diklat atau pelatihan secara struktural dan fungsional, membangun kesamaan persepsi dna komitmen antar instansi terkait, pemutakhiran data setiap triwulan dan penyempurnaan sarana pendukung.

Strategi *Weakness Threats* (WT)

Strategi ini dirancang dengan meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi yang dapat dilakukan meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan penyempurnaan sistem pemungutan pajak, peningkatan kinerja operasional, meningkatkan ketepatan atau kecepatan pelayanan dan sosialisasi informasi secara akurat kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi, pertumbuhan dan elastisitas terlihat bahwa pajak daerah yang potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan dari hasil penelitian Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial dikembangkan berpengaruh signifikan

terhadap belanja daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil analisis SWOT maka dapat disimpulkan strategi yang tepat untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak potensial adalah pada strategi SO. Adapun strategi SO tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM atau aparatur, meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sarana komputer dan koordinasi dengan tim intensifikasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

SARAN

Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan pada masa yang akan datang agar terus menerus berupaya memberikan solusi guna lebih meningkatkan komponen penerimaan pajak. Upaya meningkatkan jenis-jenis penerimaan, dilakukan dengan baik melalui indentifikasi objek pajak maupun subjek pajak secara benar dan tepat, penetapan tarif pajak sesuai kondisi terbaru, mengeluarkan izin baru dan menutup objek pajak yang habis masa berlaku kegiatan usahanya serta melakukan pengelolaan pajak secara lebih efisien dan efektif. Dengan begitu pajak daerah akan meningkat dan pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Berdasarkan dari hasil pajak yang potensial yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diharapkan kepada pemerintah untuk mendata ulang semua kendaraan bermotor yang masuk dalam kategori kena pajak, terus menjalankan Program dan Sosialisasi peningkatan kesadaran membayar pajak pada masyarakat serta meningkatkan kemampuan profesional petugas. Proses sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sebaiknya terus dilakukan karena ini sangat mempengaruhi dan menentukan tinggi rendahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pembinaan yang dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan dan himbauan-himbauan yang intensif dan terus menerus seharusnya dilakukan oleh aparat perpajakan untuk mengingatkan para wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bagi pembiayaan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Proses pengawasannya sesuai dengan mekanisme hukum yang diharapkan tidak hanya dilakukan kepada wajib pajak, tetapi juga kepada para petugas pajak itu sendiri, agar tidak terdapat penyalahgunaan hasil penerimaan. Upaya ini sekaligus dapat menekan potensi kecurangan dan korupsi yang ada sehingga tidak merugikan penerimaan pendapatan daerah dan juga tidak merugikan negara. Terlihat Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

diharapkan kepada pemerintah menstasbilkan dari perolehan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah lalu nanti akan digunakan untuk belanja daerah untuk pembangunan daerah di Provinsi Jambi. Seharusnya pemerintah khususnya Bakeuda Provinsi Jambi dapat mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak terutama pajak potensial yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Vivi. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Hasil Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Universitas Bhayangkara Surabaya* 2 (1) 1-14
- Dirasmi, Sipti. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Universitas Dehasen Bengkulu* 3 (7) 114-125
- Hidayah, Siti Rahmawati. (2012). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Periode (2006-2010). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta* 5 (2) 13-24
- Hasmin, (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah pada Kabupaten Soppeng. *Jurnal STIE Amkop Makasar* 1 (2) 15-26
- Juri, H. Mat. (2012). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Universitas Negeri Samarinda*
- Rangkuti, Freddy. (2013). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Sudjana. (2002). *Metode statistika*. Tarsito : Bandung
- Suparmoko, (2002). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. BPFE : Yogyakarta.
- Supriyanto, Agus. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Universitas Pandaran Semarang* 5 (1) 1-14

-
- Trisnaningrum, Nila. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2014. *Jurnal Universitas Surabaya* 3 (5) 76-87
- Usulu, Elvira M. (2017). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jaya Pura. *Jurnal Universitas Jayapura* 1 (3) 25-37